



DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Ketimpangan Pembangunan Sektor Ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2023

Dwi Raharjo^{1*}, Yuswanti Ariani Wirahayu²

¹Universitas Negeri Malang, Jawa Timur, Indonesia, dwi.raharjo.2107226@students.um.ac.id

²Universitas Negeri Malang, Jawa Timur, Indonesia, yuswanti.ariani.fis@um.ac.id

*Corresponding Author: dwi.raharjo.2107226@students.um.ac.id

Abstract: *Inequality in economic development between sectors remains a significant issue in the Special Region of Yogyakarta (DIY). This is evidenced by the Williamson Index value, which reached 0.4504 in 2021, categorized as medium. This study aims to analyze the inequality of economic sectors in Yogyakarta Special Region (DIY) between 2013 and 2023. The method used is descriptive quantitative with Williamson Index analysis. The data used includes ADHK GRDP of economic sectors and population by city/district in Yogyakarta Province. The results showed that during this period there was high inequality in 9 sectors and moderate inequality in 8 sectors. The findings are expected to be a reference for the DIY Provincial Government in formulating more effective development policies, to create equitable development of economic sectors in all regions, which in turn can encourage inclusive economic growth, reduce inter-regional inequality, and improve overall community welfare.*

Keywords: *Development Inequality, Economic Sector, DIY, Williamson Index, GRDP*

Abstrak: Ketimpangan pembangunan ekonomi antar sektor ekonomi masih menjadi isu penting di DIY, hal ini dibuktikan dengan nilai Indeks Williamson mencapai 0,4504 termasuk kategori sedang pada tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan sektor-sektor ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) antara tahun 2013 dan 2023. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan analisis Indeks Williamson. Data yang digunakan meliputi PDRB ADHK sektor ekonomi serta jumlah penduduk menurut kota/kabupaten di Provinsi DIY. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode tersebut terdapat ketimpangan tinggi di 9 sektor dan ketimpangan sedang di 8 sektor. Temuan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi DIY dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih efektif, untuk menciptakan pemerataan pembangunan sektor ekonomi di seluruh wilayah, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mengurangi ketimpangan antar wilayah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kata Kunci: Ketimpangan Pembangunan, Sektor Ekonomi, DIY, Indeks Williamson, PDRB

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat di suatu negara dalam periode yang panjang melalui upaya-upaya yang terencana (Patta Rapanna & Zulfikry Sukarno, 2017). Pembangunan ekonomi merupakan tujuan utama pada setiap negara, terkhusus pada negara berkembang. Negara menginginkan terjadinya pemerataan pembangunan ekonomi pada tiap-tiap wilayah, dengan naiknya pembangunan ekonomi maka kesejahteraan penduduk akan juga meningkat. Pembangunan ekonomi yang terjadi langsung dan tidak langsung bisa memberikan pengaruh pada permasalahan ketimpangan wilayah (Rahman, 2018).

Ketimpangan terjadi diawali dengan terjadinya bermacam perbedaan pada wilayah-wilayahnya, sebab perbedaan ini suatu wilayah dengan keunggulan untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi dan untuk melakukan pembangunan juga akan berbeda, akan ada daerah yang relatif maju dan terbelakang sebagai hasil dari berbagai bentuk pembangunan. Ketimpangan pembangunan disetiap wilayah berikutnya juga dapat berakibat pada tingkat kesejahteraan penduduk. Konsekuensi yang ditimbulkan adalah bentuk kecemburuan serta ketidakpuasaan penduduk yang berlanjut pada implikasi politik dan kentraman masyarakat (Sjafrizal, 2014). Ketimpangan pembangunan semakin besar merupakan dampak dari terjadinya tidak meratanya pembangunan ekonomi pada berbagai wilayah, meningkatnya ketimpangan bisa mengakibatkan ketimpangan dalam kesejahteraan masyarakat dan pembentukan sentimen ketidakadilan. Konflik cenderung dipicu oleh keadaan ini (Azim et al., 2022).

Negara Indonesia tersusun atas 34 provinsi mempunyai latar belakang yang bervariasi antar daerah. Variasi ini terwujud dalam distribusi sumber daya alam, sosial, ekonomi, dan aspek-aspek alam pada setiap provinsi. Variasi akan melahirkan tantangan dalam melakukan pemerataan pembangunan ekonomi hal ini disebabkan berpusatnya suatu kegiatan ekonomi yang berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah atau provinsi dengan sumber daya alam yang melimpah. Variasi tersebut akan menyebabkan ketimpangan pembangunan, di Indonesia ketimpangan pembangunan wilayah tergolong lebih tinggi jika dilihat dengan negara maju, atau malah dengan negara yang masih berkembang. Meningkatnya ketimpangan ini memberikan konsekuensi negatif dan cenderung memunculkan kecemburuan sosial wilayah terbelakang dengan wilayah yang maju (Zasriati, 2022).

Ketidakeimbangan pembangunan antar sektor ekonomi masih menjadi tantangan utama di Indonesia, termasuk di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pada tahun 2021, Indeks Williamson Provinsi DIY tercatat sebesar 0,4504, yang menandakan adanya ketimpangan dengan kategori sedang (BAPPEDA Daerah Istimewa Yogyakarta, 2022). Ketimpangan ini disebabkan oleh berbedanya potensi sektor ekonomi pada kota/kabupaten di Provinsi DIY. Kabupaten Sleman memiliki potensi sektor jasa pendidikan, Kabupaten Bantul memiliki potensi sektor pertanian, Kota Yogyakarta memiliki potensi sektor jasa keuangan, Kabupaten Kulon Progo memiliki potensi sektor pertambangan, dan Kabupaten Gunungkidul memiliki potensi sektor pertanian (Shinta Iffah Rosyidah, 2022).

Ketimpangan dalam pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah dapat dilihat dari pola pertumbuhan ekonomi dan sektor-sektor yang dominan dalam tiap daerah. Di DIY, upaya untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui berbagai kebijakan, termasuk meningkatkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di berbagai kabupaten dan menekan biaya hidup masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun, dampak dari kebijakan ini belum merata di seluruh wilayah, terutama di pedesaan yang masih mengalami kendala infrastruktur dan akses ekonomi yang terbatas. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa ketimpangan ekonomi di Indonesia, termasuk DIY, dipengaruhi oleh variabel ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, investasi, dan jumlah penduduk. Ketiga faktor tersebut

berdampak positif terhadap ketimpangan ekonomi, meskipun pengaruh masing-masing variabel secara parsial berbeda (Dzikri Ainun Faza et al., 2023).

Provinsi DIY adalah daerah wilayah yang memiliki potensi pembangunan pada sektor pendidikan, budaya, dan wisata. Sektor ekonomi yang memiliki peran penting di Provinsi DIY adalah sektor pertanian. Sektor tersebut menjadi penopang perekonomian di Provinsi DIY. Berdasarkan catatan BPS Provinsi DIY menyatakan bahwa 24,62% penduduk bekerja di sektor pertanian. Angka ini dinilai lebih besar daripada sektor perdagangan (18,02%), industri pengolahan (15,08%), dan sektor akomodasi (9,62 %). Sektor kehutanan, perikanan, dan pertanian sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional (BPS DIY, 2022a).

Jika dibandingkan sektor seperti manufaktur dan konstruksi dengan sektor pertanian sebenarnya cenderung lebih kecil kontribusinya terhadap PRDB Provinsi DIY, meskipun sektor ini memegang peran utama dalam penyerapan tenaga kerja, hal ini menandakan adanya ketimpangan kontribusi antar sektor ekonomi yang dapat memengaruhi perbedaan kesejahteraan masyarakat. Sektor industri pengolahan, misalnya, meskipun mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap PDRB, distribusi manfaat ekonominya tidak merata dan sering kali terkonsentrasi di wilayah perkotaan, meninggalkan wilayah pedesaan yang kurang berkembang (BPS DIY, 2022b). Dengan mempertimbangkan alasan yang telah dipaparkan, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi ketimpangan antar sektor ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) antara tahun 2013 hingga 2023. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang dapat memperkuat upaya mencapai pembangunan yang lebih merata dan inklusif di Provinsi DIY.

METODE

Penelitian ini berjenis deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif bertujuan untuk memvisualisasikan situasi secara tepat dan akurat, tidak untuk mencari koneksi antara variabel bebas dan variabel terikat atau melakukan perbandingan dua variabel atau lebih yang berguna mendapatkan informasi tentang sebab akibat, tetapi penelitian ini dilaksanakan guna memberikan jawaban untuk sebuah masalah dan mendapatkan informasi yang lebih luas berkenaan sebuah fenomena dengan menggunakan cara-cara pendekatan kuantitatif (Satriadi, Anoesyirwan Moeins, Tubel Agusven, Sjukun, 2023).

Data Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) berdasarkan sektor dan jumlah penduduk per kota/kabupaten di Provinsi DIY digunakan untuk periode 2013 hingga 2023. Data jumlah penduduk diperoleh dari buku Profil Perkembangan Kependudukan Daerah Istimewa Yogyakarta, sementara data PDRB ADHK berasal dari Badan Pusat Statistik Provinsi DIY. Penelitian ini mencakup semua sektor yang tercatat dalam PDRB ADHK, yang terdiri dari 17 sektor.. Kedua data tersebut kemudian diformulasikan menggunakan teknik analisis Indeks Williamson dengan bantuan software Microsoft Excel, dan akhirnya didapat nilai ketimpangan pembangunan persektor dan pertahun. Pemilihan metode penelitian sesuai untuk analisis ketimpangan sebab membandingkan tingkat pembangunan dan tidak tingkat distribusi pendapatan antar kelompok penduduk (BPS Jawa Tengah, 2024). Berikut adalah formula indeks williamson:

$$IW = \sqrt{\frac{\sum(Y_i - Y)^2 F_i/n}{Y}}$$

Penjelasan:

- IW = Indeks Williamson yang memiliki nilai antara 0 dan 1
- Y_i = PDRB ADHK sektor di kabupaten/kota
- Y = Rata-rata PDRB ADHK sektor di tingkat provinsi
- f_i = Total penduduk di kabupaten/kota
- n = Total penduduk di provinsi

Hasil penghitungan Indeks Williamson dapat dibagi menjadi tiga kategori yakni ketimpangan pembangunan yang rendah ditunjukkan dengan nilai di bawah 0,3, ketimpangan pembangunan sedang ditunjukkan dengan nilai antara 0,3 dan 0,5, dan ketimpangan pembangunan tinggi ditunjukkan dengan nilai di atas 0,5 (Sukarniati et al., 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketimpangan pembangunan sektor ekonomi adalah perbedaan atau tidak meratanya pembangunan sektor ekonomi yang ada disuatu negara (Kuliati et al., 2018). Pertumbuhan ekonomi dan produktivitas tenaga kerja adalah faktor kunci yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan sektor ekonomi di Provinsi DIY. Tabel 1 menampilkan data mengenai kedua faktor ini. Beberapa sektor, seperti pengelolaan air dan konstruksi menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari rata-rata pada tahun 2019, serta produktivitas tenaga kerja yang lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meskipun pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi sektor ini masih berada di bawah rata-rata, sektor ini tetap dianggap produktif dan berkembang pesat. Pergeseran investasi dari pengembangan lahan ke pembangunan gedung tinggi atau apartemen menjadi pendorong utama pertumbuhan di sektor konstruksi. Produktivitas tenaga kerja di sektor real estate, pemerintahan, dan pendidikan tetap berada di atas rata-rata yang umum. Namun, pertumbuhan ekonomi di sektor-sektor tersebut menurun dari yang sebelumnya lebih tinggi dari rata-rata menjadi lebih rendah, sehingga sektor-sektor ini beralih kategori dari berkembang pesat menjadi maju tetapi tertekan. Selain itu, peningkatan investasi dalam penyediaan akomodasi turut mendorong pertumbuhan di sektor real estate (BPS DIY & Bappeda DIY, 2020).

Tabel 1. Produktivitas Tenaga Kerja & Pertumbuhan Ekonomi/Kesempatan Kerja

Sektor	Produktivitas Tenaga Kerja		Rata-Rata Pertumbuhan 2015-2019 (%)	
	2015	2019	Ekonomi	Kesempatan Kerja
Pengelolaan air, air limbah, daur ulang sampah, remediasi	31,02	34,18	4,93	3,68
Konstruksi	67,01	109,4	9,91	0,33
Real Estate	1.642,47	7.067,91	5,38	-24,61
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jamsos Wajib	134,64	151,33	4,36	5,42
Jasa Pendidikan	76,16	78,03	5,28	6,91

Sumber: BPS DIY & BAPPEDA DIY, 2020

Tabel 2 menampilkan hasil penelitian yang mengindikasikan bahwa sejumlah sektor ekonomi mengalami ketimpangan pembangunan yang cukup signifikan. Sektor-sektor dengan nilai rata-rata Indeks Williamson lebih dari 0,5, seperti sektor jasa, menunjukkan adanya ketimpangan yang tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan di sektor-sektor tersebut masih terpusat dan belum merata di seluruh wilayah DIY. Sektor-sektor seperti pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, konstruksi, perdagangan, transportasi, reparasi kendaraan, serta administrasi pemerintah, pertahanan, jaminan sosial, dan jasa lainnya, yang memiliki nilai rata-rata Indeks Williamson lebih dari 0,3, juga menunjukkan ketimpangan yang cukup besar. Ini menunjukkan bahwa kemajuan di sektor-sektor tersebut masih terkendala dan belum merata.

Tabel 2. Hasil Analisis Indeks Williamson

Sektor Ekonomi	Indeks Williamson											Rata- Rata
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,45	0,46	0,46	0,47	0,47	0,48	0,48	0,49	0,49	0,50	0,51	0,48
Pertambangan dan Penggalian	0,51	0,51	0,51	0,52	0,53	0,58	0,59	0,59	0,60	0,60	0,61	0,56
Industri Pengolahan	0,54	0,53	0,53	0,53	0,52	0,52	0,53	0,52	0,52	0,53	0,54	0,53
Pengadaan Listrik dan Gas	0,79	0,79	0,79	0,78	0,77	0,78	0,78	0,78	0,79	0,80	0,81	0,79
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,71	0,70	0,71	0,71	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,70
Konstruksi	0,44	0,43	0,43	0,44	0,45	0,45	0,48	0,41	0,44	0,46	0,48	0,45
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,37	0,35	0,35	0,35	0,36	0,38	0,39	0,37	0,37	0,38	0,40	0,37
Transportasi dan Pergudangan	0,36	0,36	0,36	0,37	0,40	0,42	0,40	0,33	0,34	0,39	0,43	0,38
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,70	0,69	0,69	0,70	0,71	0,72	0,74	0,65	0,65	0,68	0,71	0,69
Informasi dan Komunikasi	0,69	0,67	0,67	0,68	0,68	0,69	0,70	0,74	0,76	0,77	0,78	0,71
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,89	0,86	0,86	0,87	0,86	0,86	0,87	0,87	0,87	0,87	0,88	0,87
Real Estate	0,75	0,73	0,73	0,73	0,73	0,74	0,75	0,75	0,76	0,76	0,77	0,75
Jasa Perusahaan	0,86	0,86	0,87	0,87	0,89	0,90	0,91	0,87	0,88	0,90	0,91	0,88
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	0,58	0,57	0,57	0,58	0,57	0,58	0,58	0,58	0,59	0,60	0,61	0,58
Jasa Pendidikan	0,64	0,62	0,63	0,63	0,64	0,65	0,66	0,68	0,69	0,69	0,70	0,66
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,80	0,78	0,78	0,79	0,78	0,80	0,80	0,83	0,84	0,85	0,86	0,81
Jasa Lainnya	0,48	0,46	0,46	0,46	0,46	0,47	0,49	0,44	0,47	0,52	0,54	0,48

Keterangan: warna hijau menandakan ketimpangan rendah, warna kuning menandakan ketimpangan sedang, dan warna merah menandakan ketimpangan tinggi

Sumber: Data Olahan, 2024

Pada tahun 2020, terjadi penurunan ketimpangan pembangunan di sektor-sektor seperti industri dan jasa. Bahwasannya pada tahun 2020, kondisi ekonomi DIY kontraksi akibat terjadinya pandemi Covid-19 yang menunjukkan kondisi pertumbuhan ekonomi negatif. Wilayah DIY hanya tumbuh sebesar -2,69%. Pertumbuhan kontraksi paling tinggi ada di Kabupaten Kulon Progo dengan tingkat pertumbuhan -4,06%. Selain itu, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta juga mengalami kontraksi lebih besar dari menurunnya pertumbuhan dua daerah lainnya, yakni -3,91% dan -2,42%. Semua penurunan tersebut berakibat pada tingkat ketimpangan pembangunan menurun daripada tahun sebelumnya (BAPPEDA Daerah Istimewa Yogyakarta, 2022).

Nilai Indeks Williamson tertinggi untuk jasa perusahaan adalah 0,88. Perbedaan dalam kemampuan setiap kota atau kabupaten untuk mengembangkan sektor jasa perusahaan, yang menyebabkan keterlambatan dalam pembangunan sektor tersebut. Studi menunjukkan bahwa Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta memiliki basis dalam pengembangan sektor jasa perusahaan, sedangkan Kabupaten Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul tidak memiliki basis dalam pengembangan sektor jasa perusahaan. Artinya, sektor basis dapat memenuhi kebutuhan di area lokal dan juga dapat dipasarkan ke luar wilayah tersebut. Sebaliknya, sektor non basis hanya dapat memenuhi kebutuhan di wilayahnya sendiri (Shinta Iffah Rosyidah, 2022). Nilai Indeks Williamson yang paling rendah ditemukan di sektor perdagangan besar dan eceran, yang mencapai 0,37. Peningkatan aktivitas perdagangan internasional menyebabkan nilai kecil tersebut. Peningkatan ekspor Provinsi DIY dari US\$ 333,86 pada tahun 2015 menjadi US\$583,28 pada tahun 2022 menunjukkan hal ini. Munculnya budaya belanja online, yang membuat jual beli jauh lebih mudah, mendorong peningkatan ini (BPS DIY, 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pembangunan sektor ekonomi di Provinsi DIY masih cukup tinggi. Hal ini terlihat dari 9 sektor ekonomi yang mengalami ketimpangan pembangunan besar, sementara 8 sektor lainnya mengalami ketimpangan pembangunan yang sedang. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi DIY dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah yang lebih terfokus, dengan harapan dapat tercapai pemerataan pembangunan sektor ekonomi di seluruh wilayah. Pada akhirnya, hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mengurangi ketimpangan antarwilayah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

REFERENSI

- Azim, A. N., Sutjipto, H., & Fahmi Ginanjar, R. A. (2022). Determinan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antarprovinsi Di Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, 2(1), 1–16. <https://doi.org/10.23969/jrie.v2i1.23>
- BAPPEDA Daerah Istimewa Yogyakarta. (2022). *KETIMPANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI ANTAR KABUPATEN/KOTA SE-DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA*. diandra kreatif.
- BPS DIY. (2022a). Keadaan Ketenagakerjaan D.I. Yogyakarta Februari 2024. *Badan Pusat Statistik*, 36, 1.
- BPS DIY. (2022b). *PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MENURUT LAPANGAN USAHA*.
- BPS DIY. (2023). *Statistik Ekspor Dan Impor Daerah Istimewa Yogyakarta 2016-2023*.

- BPS DIY, & Bappeda DIY. (2020). Analisis Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta 2020. *Analisis Ketimpangan Pendapatan Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. BPS Jawa Tengah.
- BPS Jawa Tengah. (2024). *ANALISIS INDEKS WILLIAMSON PROVINSI JAWA TENGAH 2019-2023*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Dzikri Ainun Faza, Dwi Susilowati, & Zainal Arifin. (2023). Analisis Ketimpangan, Pola Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Unggulan di Kawasan Kedungsepur Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 7(2), 180–194.
- Kuliati, W. O., Bafadal, A., & Abdullah, W. G. (2018). Analisis Ketimpangan Pembangunan Sektor Petanian Pada Wilayah Daratan Di Sulawesi Tenggara Dengan Pendekatan Indeks Williamson. *Jurnal Sosio Agribisnis*, 3(2), 33–41. <https://doi.org/10.33772/jsa.v3i2.7590>
- Patta Rapanna & Zulfikry Sukarno. (2017). *EKONOMI PEMBANGUNAN*. CV SAH MEDIA.
- Rahman, M. (2018). ANALISIS DISPARITAS PEMBANGUNAN DI INDONESIA TAHUN 2010-2015 (Studi Kasus: 33 Provinsi). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 6(2).
- Satriadi, Anoesyirwan Moeins, Tubel Agusven, Sjukun, S. (2023). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF*. Penerbit. CV. AZKA PUSTAKA.
- Shinta Iffah Rosyidah. (2022). Analisis Potensi Sektor Ekonomi Pada Kabupaten Dan Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi*, 27(3), 296–316. <https://doi.org/10.24912/je.v27i3.1111>
- Sjafrizal. (2014). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Rajawali Press.
- Sukarniati, L., Lubis, F. R. A., Zakiyyah, N. A. A., & Ashari, B. (2021). *EKONOMI PEMBANGUNAN (Teori dan Tantangan di Negara Berkembang)*. UAD PRESS. https://books.google.co.id/books?id=eAU_EAAAQBAJ
- Zasriati, M. (2022). Analisis Ketimpangan Pembangunan Di Indonesia Tahun 2010-2020. *Al-Dzahab*, 3(2), 119–131. <https://doi.org/10.32939/dhb.v3i2.1494>